1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. **Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan**

Pada April 2026, di Provinsi Banten terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,14 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,61. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,07 persen dengan IHK sebesar 111,93. Inflasi y-on-y sebesar 2,14 persen pada April 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,84 persen; kelompok transportasi sebesar 0,95 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,50 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,85 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,75 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,39 persen.

Pada Mei 2026, di Provinsi Banten terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,70 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,62. Tertinggi di Kabupaten Lebak sebesar 3,81 persen dengan IHK sebesar 111,90. Inflasi *y-on-y* sebesar 2,70 persen pada Mei 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,96 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,77 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,49 persen; kelompok transportasi sebesar 1,27 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,41 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,57 persen.

Pada Juni 2026, di Provinsi Banten terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,93 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,07. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,68 persen dengan IHK sebesar 112,23. Inflasi y-on-y sebesar 2,93 persen pada Juni 2026 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,81 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,49 persen; kelompok transportasi sebesar 3,80 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,72 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,28 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,38 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,53 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan laporan perekonomian daerah Banten pada triwulan II 2026, kondisi inflasi Provinsi Banten berada pada kisaran target sasaran nasional (2,5\% \pm 1\%). Meskipun pertumbuhan ekonomi Banten terbilang cukup kuat pada periode ini (5,49\% y-o-y), terdapat beberapa faktor teknis dan tantangan utama dalam pengendalian inflasi:

1) Tekanan Komoditas Pangan (Volatile Foods)

Fluktuasi Pasokan & Cuaca: Komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam menjadi pemicu utama fluktuasi harga bulanan. Faktor cuaca pancaroba pada triwulan II memengaruhi produktivitas panen di beberapa sentra produksi pangan Banten. Ketergantungan Pasokan Antardaerah (KAD): Sebagian kebutuhan komoditas pokok Banten masih disokong oleh pasokan dari luar provinsi (seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur). Kenaikan biaya logistik atau gangguan distribusi antarwilayah langsung berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang eceran.

2) Disparitas Inflasi Antarwilayah (Kabupaten/Kota)

Terjadi ketimpangan tingkat harga yang lumayan signifikan antarwilayah di Banten. Wilayah kabupaten dengan jalur distribusi lebih panjang (seperti Kabupaten Lebak) mencatatkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan pusat industri/perdagangan (seperti Kota Tangerang). Hal ini menunjukkan efisiensi rantai pasok lokal yang belum merata.

3) Tekanan Inflasi Inti & Komoditas Perhiasan

Kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas perawatan pribadi turut memberikan andil bulanan terhadap inflasi di wilayah perkotaan (seperti Kota Serang dan sekitarnya). Kenaikan harga emas dunia memicu kenaikan komponen inflasi berbasis harga komoditas global.

4) Tantangan Efisiensi Rantai Distribusi dan Biaya Logistik

Panjangnya mata rantai perdagangan dari tingkat produsen/petani hingga konsumen akhir di pasar-pasar tradisional Banten memicu margin perdagangan yang cukup lebar. Biaya penanganan pasca-panen serta transportasi bahan pangan masih menjadi beban biaya yang diteruskan ke konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah**

TPID Provinsi Banten secara konsisten bersinergi dengan Instansi Vertikal (Bank Indonesia, Bulog, BPS) serta OPD terkait guna mengimplementasikan strategi 4K sepanjang Triwulan II:

1) Keterjangkauan Harga

Gerakan Pangan Murah Tahun 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 telah dilaksanakan sebanyak 32 kali, yang terdiri dari 22 (Dua puluh dua) GPM APBD, 4 (empat) GPM APBN dan 6 (enam) GPM Mandiri.

2) Ketersediaan Pasokan

a) Pada tanggal 30 April 2026 Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui UPTD BPTPHP melaksanakan kegiatan panen perdana padi varietas Biosalin 2 yang bertempat di Sitandu. Panen dilakukan pada lahan seluas ±8.000 m^2 yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai benih padi berlabel ungu oleh kelompok tani penangkar

b) Dinas Pertanian Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan kegiatan **Gerakan Tanam (Gertam) Padi Metode PM-AAS** di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan luas tanam, produktivitas padi, serta penguatan ketahanan pangan nasional melalui penerapan teknologi budidaya modern yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan kegiatan ini dilaksanakan . Hingga akhir Juni 2026, Kabupaten Lebak telah merealisasikan produksi padi sekitar **475 ribu ton** dari target tahunan sekitar **691 ribu ton.**

3) Kelancaran Distribusi

Melakukan inspeksi mendadak ke Gudang BULOG, Distributor Minyak Goreng, dan Pasar Induk untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan (hoarding).

4) Komunikasi Efektif

1) Evaluasi Data IHK BPS: Koordinasi intensif TPID dengan BI dan BPS dalam menganalisis data Indeks Harga Konsumen (IHK) mingguan sebagai dasar pengambilan keputusan terukur.

2) Edukasi & Rapat Koordinasi: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID serta imbauan belanja bijak kepada masyarakat untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan mencegah panic buying

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1) Aktif melakukan inspeksi lapangan untuk memantau langsung kondisi harga dan pasokan barang.

2) Stabilitas harga harus dijaga pada seluruh komoditas utama, terutama bahan pangan.

3) Hambatan logistik akibat infrastruktur yang kurang memadai perlu segera diatasi untuk memperlancar distribusi.

4) Program operasi pasar murah harus terus ditingkatkan guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

5) Edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan, perlu digalakkan untuk meningkatkan daya beli dan stabilitas ekonomi.

6) Kolaborasi antar anggota TPID harus ditingkatkan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi lebih terkoordinasi dan efektif.

Mengidentifikasi beberapa wilayah untuk dijadikan farming industri yang dikelola secara bersama. Dengan ini dapat menolong setiap stakeholder. Meringankan dan mendorong lapangan pekerjaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a) Intensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) di titik rawan dan manfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
b) Perluas Kerja Sama Antardaerah (KAD) business-to-business dengan sentra produksi dan optimalkan fasilitas cold storage untuk menjaga buffer stock.
c) Sidak jalur logistik bersama Satgas Pangan untuk cegah penimbunan serta hubungkan langsung kelompok tani ke pedagang pasar.
d) Kampanyekan edukasi belanja bijak dan publikasikan ketersediaan stok pangan secara transparan untuk menjaga ekspektasi publik.